



Policy Paper

Religiosity Index 2022





Policy Paper

Disusun berdasarkan hasil penelitian Religiosity Index Tahun 2022

Pelindung

Prof. Dr. Suyitno, M.Ag

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Pengarah

Dr. Muharram Marzuki

Sekretaris Badan Litbang dan Diklat

Penanggung jawab Kegiatan

Dr. H. Mohsen

PLT. Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Ketua Tim Peneliti:

Dr. Mahmud Syaltout, S.H., DEA.

Tim Peneliti MUKADDIMA

Dr. phil. Syaifudin Zuhri, MA; Amrullah, M.Hum; Rizki Riyadu Taufiq, MA Muhammad Zulkarnain, M.Si; Alfon Satria Harbi, M.Si; Bimantoro Kushari, M.Si; Salma Syakira Widodo, S,Ip

**Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Jakarta, 2020**



POLICY PAPER RELIGIOSITY INDEX 2022

ISBN : xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Desain Cover dan Layout: A.S. Harbi
vi + 9 hlm; 21 x 29,7 cm | Cetakan I, 2020

© Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Diterbitkan Oleh:

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Jl. H. M. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat

Telp/Fax: (021) 21201516, 3920380, 3920674

Website: balitbangdiklat.kemenag.go.id

Email : balitbangdiklat@kemenag.go.id

Untuk Akses Dashboard Relix 2022

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWU0MWFhZGEtMTVmZS00MjgzLWJlOWYtNjI1MjI2YmE5NGMzliwidCI6ImM5ZTMxMzRhLWFkOGUtNGYwNi1iMzI0LTliMGNmZGYzNmUwYSIsImMiOjEwfQ%3D%3D>



Daftar Isi

Policy Paper	5
“Agama Sebagai Inspirasi” dalam Empat Dimensi	5
Metode	6
Temuan	7
Analisis Masalah	9
Dimensi Permasalahan Persaudaraan Keagamaan	9
Dimensi Permasalahan Persaudaraan Kebangsaan	10
Dimensi Permasalahan Persaudaraan Kemanusiaan.....	11
Dimensi Permasalahan Keberlangsungan Lingkungan	12
Rekomendasi	13
Krisis Persaudaraan Kebangsaan.....	13
Krisis Persaudaraan Keagamaan.....	15
Krisis Persaudaraan Kemanusiaan	16
Krisis Kesenambungan Lingkungan	17



Metode

Religiosity index memotret agama tidak semata memotrek agama sebagai *organizational category*, melainkan sebagai *analytical factor* yang mampu bertransformasi menjadi inspirasi manusia dalam kehidupannya. Agama dalam religiosity index tidak dipahami sebagai afiliasi satu individu terhadap satu institusi agama tertentu, melainkan agama sebagai fakta sosial. Karenanya, religiosity index lebih menekankan pada *empirical cases* yang bersifat public dan dianalisis melalui *negative-indexing*. Dengan metode ini, keberagamaan diukur tidak melalui index persepsional yang sering kali bersifat personal, melainkan melalui *empirical examination* dan bersifat sosial. Proses eksiminasi empiris terhadap empat dimensi persaudaraan ini dilakukan terhadap setiap kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Dalam analisisnya, Religiosity Index menggunakan Analytical Network Process (ANP) yaitu sebuah metode matematis yang dapat mengkombinasikan nilai-nilai *Intangible* dan *judgement* subyektif dengan data-data statistik dan faktor-faktor *tangible* lainnya (Saaty, 2008) dan juga merupakan generalisasi dari Analytic Hierarchy Process (AHP). Dalam pengumpulan data, Religiosity Index akan menggunakan dua metode yaitu: Open-Source Intelligence (OSINT) dan Human Intelligence (HUMINT). OSINT merupakan Teknik pengumpulan informasi yang tersedia untuk umum, baik itu melalui surat kabar, berita online, data-data resmi yang bisa diakses publik secara legal. HUMINT adalah penggunaan *survey online* yang didasarkan pada laporan dari semua Kepala KUA, penyuluh, penghulu, para guru di Madrasah Negeri, para dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan semua Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota beserta para stafnya di seluruh Indonesia, yang akan dilaporkan secara online. Hasil investigasi HUMINT tersebut kemudian diproses dan divalidasi secara kuantitatif dan kualitatif menggunakan Artificial Intelligence, untuk mendapatkan **Early Warning** dan **Early Response System**.

Dalam menganalisis permasalahan dan dampak (*exposure and impact*), olah data dilakukan dengan Coding System yang menjadi dasar utama penyusunan Indeks. Proses *Indexing* kemudian dilanjutkan dengan membuat *Subcode* setiap dimensi yang terbagi menjadi dua yaitu: subcode permasalahan atau *exposure* dan subcode dampak atau *Impact*. Religiosity Index 2022 juga melakukan analisis kewilayahan, dari level provinsi sampai level kabupaten kota. Kemudian dari data *open-source* yang diperoleh, dapat



ditemukan data atau informasi terkait tanggal dan lokasi kejadian. Lokasi tersebut dilengkapi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota tempat kejadian. Kasus, tanggal dan lokasi kejadian tersebut kemudian menjadi bahan utama dalam analisa perhitungan *Relation Browser*. *Relation Browser* merupakan metode penghitungan untuk mengidentifikasi hubungan (*Relations*) dan kaitan (*Connections*) antara *Code* dan *Subcode* dari setiap dimensi. Dengan menggunakan aplikasi CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software) Bernama MAXQDA, dapat ditemukan keterhubungan antara *code* dan *subcode* dari dampak setiap dimensi. Relation Browser merupakan nilai hubungan yang dihitung secara kuantitatif untuk mengukur *Likelihood* atau kemungkinan sebuah permasalahan dapat terjadi. Penghitungan tersebut berdasarkan pada pola atau tren kejadian sebuah kasus. Penghitungan tersebut juga mengukur *Impact* yang dihasilkan oleh permasalahan tersebut apabila terjadi. Proses selanjutnya adalah melakukan perhitungan besaran resiko dengan rumus atau formula:

$$Risiko = \frac{Impact \times Likelihood}{Exposure}$$

Dari rumus tersebut bisa didapatkan nilai risiko di tiap dimensi. Di mana resiko ini berguna sebagai *Early Warning System* dan juga *Early Response System*. Proses perhitungan religiosity index mulai dilakukan yang didasarkan pada *constructing index* tiap dimensi dengan pola perhitungan atau rumus $index = 100 - \text{resiko}$. Akhirnya nilai Religiosity Index dari setiap provinsi dan kabupaten/kota dapat diperoleh.

Temuan

Religiosity Index tahun 2022 menunjukkan angka rata-rata nasional yaitu **80,15** yang berarti telah masuk dalam **kategori Sangat Baik**. Meskipun meraih nilai rata-rata Sangat Baik, namun kondisi faktual dari beberapa daerah sangat perlu mendapat perhatian khusus karena beberapa permasalahan keagamaan di wilayah tertentu perlu mendapat mitigasi, yaitu:

1. Krisis Persaudaraan Kebangsaan yang perlu segera mitigasi segera agar risiko dapat dihindari (*Avoid Risk*) adalah di Kota Bandung, Banjarmasin dan Banjar Baru. Di ketiga daerah tersebut diperlukan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespon narasi Anti-Pancasila yang semakin meningkat. Selain itu, ada enam kabupaten yang sangat perlu penanganan bersama (*Share Risk*) dengan berbagai



instansi dan stakeholder terkait untuk dapat menekan laju krisis Persaudaraan Kebangsaan seperti meningkatnya narasi referendum Aceh Merdeka di kabupaten Aceh Timur, maraknya narasi anti-Pancasila/tegaknya Khilafah di Balikpapan, meningkatnya ancaman dari kelompok separatis bersenjata di kabupaten Intan Jaya dan Nduga, dan Puncak Jaya di provinsi Papua.

2. Krisis Persaudaraan Keagamaan yang perlu segera adanya mitigasi khusus adalah di Sintang dan kota Bandung karena meningkatnya ketegangan hubungan antar aliran/kelompok dalam satu agama, serta meningkatnya narasi kebencian terhadap kelompok yang dianggap sesat dalam satu agama besar. Di kota Bandung juga ditemukan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah agama lain. Selain itu, ada enam kabupaten/kota yang memerlukan pendekatan kolaborasi antar stakeholder untuk menekan permasalahan persaudaraan keagamaan. Ke enam daerah tersebut adalah Ciamis, Paniai, Minahasa, Sidoarjo, Sampang, dan Kabupaten Tasikmalaya. Pergerakan eks anggota HTI dalam menyebarkan propaganda Khilafah meningkat di Ciamis. Penolakan pembangunan mesjid dan gereja Katolik kembali meningkat di Paniai, dan berbagai aksi pergerakan eks FPI dalam memperjuangkan ideologi mereka di Minahasa, Sidoarjo, Sampang dan Tasikmalaya.
3. Permasalahan Persaudaraan Kemanusiaan yang perlu adanya mitigasi khusus segera adalah di kota Paniai, Sorong, Deiyai, dan Jambi. Kerusuhan rasial dan kerusuhan antar suku di Paniai, Sorong, dan Deiyai, dan kerusuhan terkait lahan di Jambi.
4. Permasalahan Kestinambungan Lingkungan yang sangat perlu adanya mitigasi khusus adalah di Bengkulu, Batam, Aceh Tenggara, Pinrang, Wonosobo, Manado, Lombok Timur, Mataram, Maluku Tengah, dan Pacitan akibat masifnya alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain itu, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Jayapura, Landak, Luwu Timur, Merauke, Takalar, Aceh Timur, Bengkayang, Ambon, Bandung Barat, Wajo, dan Kabupaten Bandung memerlukan kolaborasi antar instansi dan tokoh daerah agar dapat bersama-sama memitigasi kerusakan lingkungan yang telah terjadi di daerah tersebut.



Analisis Masalah

Dimensi Permasalahan Persaudaraan Keagamaan

No	Problems	Total Cases	%
1	Tension Between Religious Sect Differences	733	67.43%
2	Refusal to Establish Worship Houses for Other Religions	130	11.96%
3	Other Religion Issues	98	9.02%
4	Tension Between Religious Groups	69	6.35%
5	Refusal for Certain Religion Sects	57	5.24%
TOTAL		1,087	

Dinamika hubungan antar aliran dalam satu agama menjadi permasalahan yang paling tinggi terjadi di Indonesia, yaitu sebesar 67,43%. Yang kedua adalah penolakan membangun rumah ibadah agama tertentu oleh masyarakat sebesar 11,96%. Temuan ini menandakan bahwa toleransi antar umat beragama yang berbeda semakin membaik, atau masyarakat semakin toleran terhadap umat agama yang berbeda. Namun dari temuan tersebut justru memunculkan permasalahan lainnya, yaitu ketegangan antar aliran dalam satu agama justru semakin besar.

No	Problems	Solved (Cases)	Solved (%)	Unresolved (Cases)	Unresolved (%)	Worsen (Cases)	Worsen (%)
1	Tension Between Religious Sect Differences	44	6.00%	350	47.75%	339	46.25%
2	Refusal to Establish Worship Houses for Other Religions	15	11.54%	57	43.85%	58	44.62%
3	Other Religion Issues	1	1.02%	43	43.88%	54	55.10%
4	Tension Between Religious Groups	2	2.90%	39	56.52%	28	40.58%
5	Refusal for Certain Religion Sects	2	3.51%	24	42.11%	31	54.39%
TOTAL		64		513		510	

Permasalahan keagamaan di Indonesia cenderung lebih memburuk (*worsen*) dan belum ditemukan jalan keluarnya (*unresolved*). 54,39% Kasus penolakan terhadap aliran agama



lain justru semakin memburuk, 42,11% kasusnya tidak ada jalan keluar, dan hanya 3,51% kasus yang dapat ditemukan solusinya. Penyelesaian cukup baik dapat dilihat dari jumlah kasus penolakan pendirian rumah ibadah agama tertentu. 11,54% dari 130 kasus yang ada dapat ditemukan solusinya sehingga tidak ada eskalasi konflik.

Dimensi Permasalahan Persaudaraan Kebangsaan

No	Problems	Total Cases	%
1	Establishment of New State/Khalifah/Anti-Pancasila State	2604	65.21%
2	Pro Separatism Movement	1134	28.40%
3	Partially and/or Anti Certain Religious Groups	185	4.63%
4	Anti-Government Movement	63	1.58%
5	Partially and/or Anti Certain Race and Ethnicity	7	0.18%
TOTAL		3993	

Permasalahan utama persaudaraan kebangsaan yang kronis dihadapi oleh Indonesia adalah narasi pembentukan negara baru berbasis khilafah dan anti-Pancasila dan gerakan pro-separatisme. Yang menarik adalah minimnya kasus kebangsaan terkait anti ras/etnis tertentu di Indonesia. Dengan porsi 0,18%, kasus rasis di Indonesia dinilai sangat menurun. Sentiment negatif terhadap ras/etnis tertentu dapat memudar sejalan dengan sikap toleransi masyarakat yang semakin membaik.

No	Problems	Solved (Cases)	Solved (%)	Unresolved (Cases)	Unresolved (%)	Worsen (Cases)	Worsen (%)
1	Establishment of New State/Khalifah/Anti-Pancasila State	34	1.31%	336	12.90%	2234	85.79%
2	Pro Separatism Movement	8	0.71%	133	11.73%	993	87.57%
3	Partially and/or Anti Certain Religious Groups	3	1.62%	39	21.08%	143	77.30%
4	Anti-Government Movement	0	0.00%	10	15.87%	53	84.13%
5	Partially and/or Anti Certain Race and Ethnicity	0	0.00%	0	0.00%	7	100.00%
TOTAL		45		518		3430	



Dimensi Permasalahan Persaudaraan Kemanusiaan

No	Problems	Total Cases	%
1	Violation of Personal Human Rights	481	57.40%
2	Violation of Private Ownership Rights	225	26.85%
3	Violation of Economic, Social & Cultural Rights	58	6.92%
4	Violation of Equality Before Law Rights	44	5.25%
5	Violation of Political Rights	30	3.58%
	TOTAL	838	

Pelanggaran Hak Asasi Pribadi menjadi kasus yang paling tinggi terjadi di Indonesia, yaitu sebesar 57,4%. Hak asasi pribadi terkait dengan hak-hak dasar antara lain hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, hak untuk mengemukakan pendapat, hak beribadah menurut kepercayaan masing-masing, dan hak untuk berkumpul. Kasus kedua yang sering terjadi di Indonesia adalah pelanggaran atas hak milik pribadi sebesar 26,85%. Etnis atau suku tertentu masih dibatasi untuk memiliki tanah atau property di beberapa daerah.

No	Problems	Solved (Cases)	Solved (%)	Unresolved (Cases)	Unresolved (%)	Worsen (Cases)	Worsen (%)
1	Violation of Personal Human Rights	32	6.65%	196	40.75%	253	52.60%
2	Violation of Private Ownership Rights	10	4.44%	85	37.78%	130	57.78%
3	Violation of Economic, Social & Cultural Rights	2	3.45%	45	77.59%	11	18.97%
4	Violation of Equality Before Law Rights	0	0.00%	28	63.64%	16	36.36%
5	Violation of Political Rights	2	6.67%	18	60.00%	10	33.33%
	TOTAL	46		372		420	

Permasalahan persaudaraan kebangsaan di Indonesia cenderung tidak ada penyelesaian (*unresolved*) sebagaimana dapat dilihat persentase kasus yang tidak diselesaikan mayoritas berada di atas 40%. Temuan ini menandakan bahwa permasalahan kemanusiaan di Indonesia cenderung dibiarkan mengendap tanpa ditemukan solusinya. Hal ini berpotensi menjadi bahaya laten apabila terus berlanjut.



Dimensi Permasalahan Keberlangsungan Lingkungan

No	Problems	Total Cases	%
1	Land Clearing	1,951	70.10%
2	Protected Forest Damage	424	15.24%
3	River Damage from Wastes	183	6.58%
4	Other Damages	81	2.91%
5	Water Resource Damage	69	2.48%
6	Air Pollution from Factories & Industries	45	1.62%
7	Lake, Coastal & Ocean Damage from Wastes	30	1.08%
	TOTAL	2,783	

Pembukaan Lahan menjadi permasalahan yang paling dominan di Indonesia. 70,1% dari tujuh permasalahan lingkungan hidup diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, permukiman dan lain sebagainya. Permasalahan lainnya yang cukup besar dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia adalah kerusakan hutan lindung sebesar 15.24%. Maraknya alih fungsi lahan hutang lindung atau deforestasi di berbagai wilayah mengancam.

No	Problems	Solved (Cases)	Solved (%)	Unresolved (Cases)	Unresolved (%)	Worsen (Cases)	Worsen (%)
1	Land Clearing	83	4.25%	865	44.34%	1,003	51.41%
2	Protected Forest Damage	23	5.42%	196	46.23%	205	48.35%
3	River Damage from Wastes	25	13.66%	81	44.26%	77	42.08%
4	Other Damages	2	2.47%	29	35.80%	50	61.73%
5	Water Resource Damage	4	5.80%	30	43.48%	35	50.72%
6	Air Pollution from Factories & Industries	9	20.00%	13	28.89%	23	51.11%
7	Lake, Coastal & Ocean Damage from Wastes	3	10.00%	8	26.67%	19	63.33%
	TOTAL	149		1,222		1,412	

Permasalahan lingkungan di Indonesia rata-rata semakin memburuk. Selain itu, permasalahan tersebut juga tidak ada solusi atau tidak diselesaikan. Hanya sedikit presentase kasus lingkungan hidup yang dapat dibereskan. Dari data di atas dapat dilihat bahwa permasalahan polusi udara oleh pabrik dan industri mendapat porsi persentase



paling tinggi untuk diselesaikan, yaitu 20% dari permasalahan tersebut telah diperoleh solusinya.

Rekomendasi

Peta persoalan dan rekomendasi Langkah strategis untuk persoalan di setiap dimensi Religiosity Index untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia dapat diakses melalui:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMjU0MWFhZGZlMTVmZS00MjgzLWJlOWYtNjI1MjI2YmE5NGMzliwidCI6ImM5ZTMxMzRhLWVfOGUtNGYwNi1iMzI0LTliMGNmZGYzNmUwYSIsImMiOjEwfQ%3D%3D>

Provinsi	Mitigasi Persaudaraan Keagamaan	Mitigasi Persaudaraan Kebangsaan	Mitigasi Keberlanjutan Lingkungan	Mitigasi Persaudaraan Kemanusiaan
Aceh Timur	Monitor Risk	Share Risk	Share Risk	Control Risk
Balikpapan	Monitor Risk	Share Risk	Share Risk	Control Risk
Bandung Kota	Avoid Risk	Avoid Risk	Share Risk	Control Risk
Banjarmasin	Monitor Risk	Avoid Risk	Share Risk	Avoid Risk
Bengkulu	Control Risk	Control Risk	Avoid Risk	Control Risk
Ciamis	Share Risk	Monitor Risk	Control Risk	Avoid Risk
Intan Jaya	Monitor Risk	Share Risk	Monitor Risk	Control Risk
Jakarta Pusat	Share Risk	Monitor Risk	Monitor Risk	Avoid Risk
Jambi	Control Risk	Control Risk	Control Risk	Control Risk
Manado	Monitor Risk	Control Risk	Monitor Risk	Control Risk
Nduga	Monitor Risk	Share Risk	Monitor Risk	Monitor Risk
Paniai	Share Risk	Monitor Risk	Monitor Risk	Monitor Risk
Samarinda	Control Risk	Control Risk	Monitor Risk	Monitor Risk
Sorong Kotamadya	Monitor Risk	Monitor Risk	Monitor Risk	Share Risk

Krisis Persaudaraan Kebangsaan

Risk Scales	Regions	Recommendation
Avoid Risk	Bandung	



	Banjarmasin	<p>Kota Bandung, Banjarmasin dan Banjar Baru berada dalam kategori BAHAYA dan harus segera dimitigasi. Diperlukan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespon narasi anti-negara dan anti-pancasila di kedua daerah tersebut.</p> <p>Mainstreaming Moderasi Beragama, utamanya pada aspek komitmen kebangsaan, untuk kepala daerah dan ASN pemerintah daerah perlu segera dilakukan.</p> <p>Moderasi beragama yang menysasar tokoh agama juga perlu ditingkatkan.</p>
	Banjar Baru	
Share Risks	Aceh Timur	<p>Di enam daerah ini ditemukan 139 kasus yang umumnya adalah kasus pro-separatis dan narasi pendirian negara khilafah. Pendekatan kolaborasi antar instansi negara dan komponen masyarakat sipil, utamanya tokoh-tokoh agama, dan penegakkan hukum diperlukan agar resiko dapat dikontrol.</p>
	Balikpapan	
	Intan Jaya	
	Nduga	
	Puncak	
	Minahasa Utara	<p>Dalam memitigasi permasalahan di empat kabupaten/kota ini perlu mengatur risiko melalui intervensi kebijakan agar dampak yang ditimbulkan di 4 daerah ini dapat diminimalisir.</p>
Control Risks	Bengkulu	<p>Dalam memitigasi permasalahan di empat kabupaten/kota ini perlu mengatur risiko melalui intervensi kebijakan agar dampak yang ditimbulkan di 4 daerah ini dapat diminimalisir.</p>
	Jambi	
	Manado	<p>Di empat kabupaten/kota ini terdapat 54 kasus. 32 kasus anti NKRI dan 22 kasus pro-separatisme. Pendekatan yang dilakukan untuk kabupaten ini adalah melalui monitoring, deteksi dini dan langkah preventif yang melibatkan masyarakat serta pemimpin daerah.</p>
	Samarinda	
Monitor Risk	Ciamis	<p>Di empat kabupaten/kota ini terdapat 54 kasus. 32 kasus anti NKRI dan 22 kasus pro-separatisme. Pendekatan yang dilakukan untuk kabupaten ini adalah melalui</p>
	Jakarta Pusat	



Paniai	monitoring, deteksi dini dan langkah preventif yang melibatkan masyarakat serta pemimpin daerah.
Sorong	

Krisis Persaudaraan Keagamaan

Risk Scales	Regions	Recommendation
-------------	---------	----------------

Avoid Risks	Sintang	<p>Terkhusus Sintang dan Kota Bandung, terdapat 164 kasus, yang mana 133 diantaranya adalah kasus ketegangan hubungan antara aliran/kelompok dalam satu agama. Narasi kebencian terhadap kelompok yang dianggap sesat dalam satu agama sangat besar. Di kota Bandung juga ada ditemukan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah dari agama lain. Dengan kondisi di Sintang dan kota Bandung saat ini, sangat diperlukan adanya Satgas Khusus penanganan ketegangan hubungan umat beragama, agar dapat memitigasi potensi-potensi perpecahan di Jawa Barat, dan di kota Bandung pada khususnya.</p>
	Bandung	
Share Risks	Ciamis	<p>Di ketiga kabupaten/kota ini memerlukan pendekatan kolaborasi antar instansi negara dan komponen masyarakat sipil, utamanya tokoh-tokoh agama, dan penegakkan hukum diperlukan agar resiko permasalahan keagamaan dapat dikontrol.</p>
	Paniai	
	Minahasa	
	Sidoarjo	
	Sampang	
	Tasikmalaya Kabupaten	
Control Risks	Bengkulu	<p>Dalam memitigasi permasalahan di empat kabupaten/kota ini perlu mengatur risiko melalui intervensi kebijakan agar dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan keagamaan di 4 daerah ini dapat diminimalisir.</p>
	Jambi	
	Samarinda	
	Gowa	
	Banda Aceh	



Samarinda
Majene
Bogor Kabupaten
Banjarmasin
Intan Jaya
Manado
Nduga
Kota Sorong

Krisis Persaudaraan Kemanusiaan

Risk Scales	Regions	Recommendation
Avoid Risks	Paniai	Ketiga kabupaten/kota ini berada dalam kategori AVOID yang berarti permasalahan kemanusiaan di daerah ini harus segera dimitigasi. Diperlukan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespon permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang berpotensi dapat terjadi
	Sorong	
	Deiyai	
	Jambi	
Share Risks	Memberano Raya	Memberano dan Dogiyai memerlukan pendekatan kolaborasi antar instansi negara dan komponen masyarakat sipil, utamanya tokoh-tokoh agama, dan penegakkan hukum diperlukan agar resiko permasalahan kemanusiaan di daerah ini dapat dimitigasi dan ditekan seminimal mungkin
	Dogiyai	
	Tanjung Jabung Barat	
Control Risks	Aceh Timur	Dalam memitigasi permasalahan kemanusiaan di delapan kabupaten/kota ini memerlukan kontrol risiko melalui intervensi kebijakan atau perubahan SOP pengamanan agar dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan kemanusiaan di ke delapan daerah ini bisa diminimalisir.
	Balikpapan	
	Bandung Kota	
	Bengkulu	
	Intan Jaya	



Jambi
Manado
Nduga

Krisis Kesiambungan Lingkungan

Risk Scales	Regions	Recommendation
Avoid Risks	Bengkulu	10 kabupaten/kota ini dinilai berada dalam kategori AVOID yang berarti permasalahan lingkungan di daerah tersebut harus segera dimitigasi. Diperlukan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespon permasalahan lingkungan hidup seperti alih fungsi/pembukaan hutan, pencemaran, polusi yang berpotensi dapat mengakibatkan bencana alam yang besar.
	Batam	
	Aceh Tenggara	
	Pinrang	
	Wonosobo	
	Manado	
	Lombok Timur	
	Mataram	
	Maluku tengah	
	Pacitan	
Share Risks	Sumbawa Barat	Ke empat kabupaten ini memerlukan pendekatan berbagi risiko, seperti dengan kolaborasi antar instansi negara dan komponen masyarakat sipil, utamanya tokoh-tokoh agama/masyarakat, dan korporasi. Penegakkan hukum diperlukan agar resiko pengerusakan lingkungan di daerah ini dapat dimitigasi dan ditekan seminimal mungkin
	Luwu Utara	
	Jayapura	
	Landak	
	Luwu Timur	
	Merauke	
	Takalar	
	Aceh Timur	
	Bengkayang	
	Ambon	
	Bandung Barat	
	Wajo	
	Bandung Kabupaten	
Control Risks	Bengkulu	



Dompu	Dalam memitigasi permasalahan kemanusiaan di sebelas kabupaten/kota ini memerlukan pengaturan risiko melalui intervensi kebijakan dan mengubah protocol terkait menjaga lingkungan agar dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan di sebelas daerah ini dapat diminimalisir
Sumbawa	
Kendal	
Samarinda	
Medan	
Padang	
Pohuwato	
Solok Selatan	
Tanjung Pinang	
Pontianak	
Agam	
Tanah Laut	

Kabupaten/kota lainnya yang tidak masuk dalam ketiga kategori di atas, berarti masuk dalam kategori MONITORING RISK. Kategori ini menandakan bahwa daerah tersebut masih memiliki permasalahan dari setiap dimensi Religiosity Index yang bersifat laten, namun permasalahan tersebut relatif beresiko rendah. Oleh karena itu, Rekomendasi untuk daerah yang masuk dalam kategori Monitoring Risk adalah tetap konsisten memantau dinamika yang terjadi di berbagai kelompok masyarakat agar fungsi deteksi dini dapat berjalan dengan baik. Hal ini bertujuan agar instansi yang berwenang dapat menjalankan Tindakan preventif apabila ditemukannya potensi permasalahan dalam masyarakat.